

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 3952 K/80/MEM/2013**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN  
DAERAH PENGHASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN  
MINYAK BUMI DAN GAS BUMI UNTUK TAHUN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**

**Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Untuk Tahun 2014;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4435) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5047);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4777);
8. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 1022);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Konsultasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Kementerian Dalam Negeri Dalam Rangka Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Untuk Provinsi, Kabupaten, dan Kota Penghasil Tahun 2014 Nomor 345.4/SD.III/DIT.III/IX/2013 tanggal 9 September 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH PENGHASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI UNTUK TAHUN 2014.

KESATU : Jumlah provinsi, kabupaten, dan kota yang ditetapkan sebagai daerah penghasil dan dasar penghitungan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas bumi untuk tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. daerah penghasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi sejumlah 7 (tujuh) provinsi, 55 (lima puluh lima) kabupaten, dan 6 (enam) kota dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini;
- b. daerah penghasil sumber daya alam pertambangan gas bumi sejumlah 6 (enam) provinsi, 37 (tiga puluh tujuh) kabupaten, dan 6 (enam) kota dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Dasar penghitungan bagian daerah penghasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah lifting minyak bumi dan gas bumi dari kegiatan usaha hulu PT Pertamina EP, Kontraktor Kontrak Bagi Hasil, atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama lainnya di daerah bersangkutan.
- KETIGA : Penetapan daerah penghasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berdasarkan kriteria sebagai berikut:
- a. daerah penghasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas bumi untuk Wilayah Kerja di daratan (*onshore*) adalah kabupaten/kota yang ditetapkan terdapat lokasi kepala sumur produksi (*wellhead*) yang menghasilkan minyak bumi dan/atau gas bumi yang terjual (*lifting*) dan menghasilkan penerimaan negara;
  - b. daerah penghasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas bumi untuk Wilayah Kerja di lepas pantai (*offshore*) adalah provinsi atau kabupaten/kota yang ditetapkan terdapat lokasi kepala sumur produksi (*wellhead*) dan/atau anjungan (*platform*) yang menghasilkan minyak bumi dan/atau gas bumi yang terjual (*lifting*) dan menghasilkan penerimaan negara sesuai batas kewenangan pengelolaan wilayah laut masing-masing daerah provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Desember 2013

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

JERO WACIK

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
6. Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
7. Para gubernur yang bersangkutan
8. Para bupati/walikota yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,

  
Susyanto

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 NOMOR 3952 K/80/MEM/2013  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN  
 BAGIAN DAERAH PENGHASIL SUMBER DAYA ALAM  
 PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI  
 UNTUK TAHUN 2014

DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL  
 SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI UNTUK TAHUN 2014

NO.	WILAYAH	MINYAK BUMI	
		DAERAH PENGHASIL	JUMLAH (RIBU BAREL)
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Kabupaten/Kota atas pengelolaan di darat dan/atau laut (0 s.d. 4 Mil Laut)</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>262.675,80</b>
<b>I</b>	<b>Aceh</b>		<b>3.157,88</b>
		1. Kab. Aceh Timur	9,37
		2. Kab. Aceh Utara	812,46
		3. Kab. Aceh Tamiang	2.336,05
<b>II</b>	<b>Sumatera Utara</b>		<b>802,88</b>
		1. Kab. Langkat	287,66
		2. Kota Binjai	26,44
		3. Kab. Deli Serdang	0,20
		4. Kab. Padang Lawas	488,58
<b>III</b>	<b>Riau</b>		<b>122.814,12</b>
		1. Kab. Bengkalis	67.666,90
		2. Kab. Indragiri Hulu	641,70
		3. Kab. Kampar	13.833,00
		4. Kab. Rokan Hulu	683,68
		5. Kab. Rokan Hilir	17.982,38
		6. Kab. Siak	19.504,56
		7. Kab. Pelalawan	439,33
		8. Kab. Kep. Meranti	2.062,57
<b>IV</b>	<b>Kep. Riau</b>		<b>12.660,95</b>
		1. Kab. Natuna	8.229,62
		2. Kab. Kep. Anambas	4.431,33
<b>V</b>	<b>Jambi</b>		<b>9.692,20</b>
		1. Kab. Batang Hari	279,54
		2. Kab. Muaro Jambi	1.321,75
		3. Kota Jambi	672,57
		4. Kab. Tanjung Jabung Timur	1.825,25
		5. Kab. Tanjung Jabung Barat	4.283,03
		6. Kab. Sarolangun	898,87
		7. Kab. Tebo	411,19
<b>VI</b>	<b>Sumatera Selatan</b>		<b>28.811,05</b>
		1. Kab. Lahat	303,12
		2. Kab. Muara Enim	8.825,92
		3. Kota Prabumulih	729,61
		4. Kab. Musi Banyuasin	12.069,07
		5. Kab. Banyuasin	1.610,89

NO.	WILAYAH	MINYAK BUMBU	
		DAERAH PENGHASIL	JUMLAH (RIBU BAREL)
1	2	3	4
		6. Kab. Musi Rawas	2.720,83
		7. Kab. Ogan Ilir	1.047,26
		8. Kab. Ogan Komering Ulu	1.504,35
<b>VII</b>	<b>Lampung</b>	Kab. Lampung Timur	<b>2.919,19</b>
<b>VIII</b>	<b>Jawa Barat</b>		<b>5.965,82</b>
		1. Kab. Indramayu	1.971,12
		2. Kab. Karawang	847,06
		3. Kab. Majalengka	87,15
		4. Kab. Subang	175,32
		5. Kab. Bekasi	2.885,17
<b>IX</b>	<b>Jawa Tengah</b>	Kab. Blora	<b>584,99</b>
<b>X</b>	<b>Jawa Timur</b>		<b>37.833,88</b>
		1. Kab. Bojonegoro	33.310,95
		2. Kab. Bangkalan	537,43
		3. Kab. Sumenep	56,16
		4. Kab. Tuban	600,31
		5. Kab. Gresik	3.299,28
		6. Kab. Sidoarjo	29,75
<b>XI</b>	<b>Kalimantan Selatan</b>		<b>1.629,45</b>
		1. Kab. Tabalong	1.344,97
		2. Kab. Balangan	284,48
<b>XII</b>	<b>Kalimantan Timur</b>		<b>24.480,36</b>
		1. Kota Samarinda	131,67
		2. Kab. Kutai Kertanegara	21.151,13
		3. Kab. Kutai Timur	597,60
		4. Kab. Penajam Paser Utara	1.765,91
		5. Kota Bontang	834,05
<b>XIII</b>	<b>Kalimantan Utara</b>		<b>4.078,54</b>
		1. Kab. Bulungan	2.402,48
		2. Kab. Nunukan	501,17
		3. Kota Tarakan	1.152,14
		4. Kab. Tana Tidung	22,75
<b>XIV</b>	<b>Kalimantan Tengah</b>	Kab. Barito Timur	<b>14,53</b>
<b>XV</b>	<b>Sulawesi Tengah</b>	Kab. Morowali	<b>732,73</b>
<b>XVI</b>	<b>Maluku</b>	Kab. Seram Bagian Timur	<b>1.159,36</b>
<b>XVII</b>	<b>Papua Barat</b>		<b>5.337,87</b>
		1. Kab. Teluk Bintuni	2.191,49
		2. Kab. Sorong	3.146,38
<b>B.</b>	<b>Provinsi atas pengelolaan di Laut (lebih dari 4 s.d. 12 Mil Laut)</b>	<b>Provinsi</b>	<b>32.875,93</b>
		1. Lampung	4.931,63
		2. Kep. Bangka Belitung	452,83
		3. Jawa Barat	6.784,84
		4. Kalimantan Timur	15.318,07
		5. Kep. Riau	537,34
		6. Jawa Timur	601,47
		7. DKI Jakarta	4.249,75

NO.	WILAYAH	MINYAK BUMI	
		DAERAH PENGHASIL	JUMLAH (RIBU BAREL)
1	2	3	4
C.	Pemerintah Pusat atas pengelolaan di Laut lebih dari 12 Mil Laut	Pemerintah Pusat	21.998,29

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,



Susyanto


<b>VIII</b>	<b>Jawa Timur</b>		<b>42.354,36</b>
		1. Kab. Sumenep	3.850,20
		2. Kab. Sidoarjo	5.000,64
		3. Kab. Gresik	26.319,24
		4. Kab. Bangkalan	1.679,95
		5. Kab. Bojonegoro	5.504,33
<b>IX</b>	<b>Jawa Tengah</b>		<b>1.166,49</b>
		1. Kota Semarang	1.121,21
		2. Kab. Blora	45,28
<b>X</b>	<b>Kalimantan Timur</b>		<b>355.700,09</b>
		1. Kota Samarinda	4.996,89
		2. Kab. Kutai Kertanegara	339.619,31
		3. Kab. Penajam Paser Utara	9.845,43
		4. Kota Bontang	1.238,46
<b>XI</b>	<b>Kalimantan Utara</b>		<b>3.181,89</b>
		1. Kota Tarakan	919,29
		2. Kab. Nunukan	1.235,76
		3. Kab. Bulungan	1.026,84
<b>XII</b>	<b>Sulawesi Selatan</b>	Kab. Wajo	<b>40.557,75</b>
<b>XIII</b>	<b>Sulawesi Tengah</b>	Kab. Banggai	<b>10.944,89</b>
<b>XIV</b>	<b>Papua Barat</b>		<b>320.148,19</b>
		1. Kab. Sorong	1.978,47
		2. Kab. Teluk Bintuni	318.169,72
<b>B.</b>	<b>Provinsi atas pengelolaan di Laut (lebih dari 4 s.d. 12 Mil Laut)</b>	<b>Provinsi</b>	<b>474.075,92</b>
		1. Jawa Barat	28.912,47
		2. Kalimantan Timur	260.573,93
		3. Kep. Riau	85.536,33
		4. Jawa Timur	62.206,39
		5. Lampung	18.132,79
		6. DKI Jakarta	18.714,01
<b>C.</b>	<b>Pemerintah Pusat atas pengelolaan di Laut lebih dari 12 Mil Laut</b>	<b>Pemerintah Pusat</b>	<b>392.905,41</b>

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,

  
Susyanto